

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 05
ATAS PENYAJIAN PERSEDIAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT
05 ON THE PRESENTATION OF INVENTORY IN FINANCIAL STATEMENT AT THE OFFICE OF
THE CENTRAL STATISTICS AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Imaniar D. Sihadi¹

Dhullo Afandi²

Wulan D. Kindangen³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

imaniarsihadi644@gmail.com

dhullo.afandi@unsrat.ac.id

wulankindangen@unsrat.ac.id

Abstrak: Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, terdapat temuan bahwasanya pengendalian atas pengelolaan persediaan pada kementerian/lembaga belum memadai, berdampak adanya pelaksanaan stock opname serta penatausahaan dan pencatatan persediaan yang tidak sesuai ketentuan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Persediaan pada BPS Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah sesuai dengan PSAP 05. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 7, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pengakuan persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 05. Pengukuran persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu diperoleh dengan pengadaan yang dilakukan dari bagian umum. Dalam pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05.

Kata Kunci: PSAP 05, Persediaan, Badan Pusat Statistik

Abstract: In the report on the results of the audit by the Financial Audit Agency (BPK) on the central government's financial statements in 2018, there are findings that the control over inventory management in ministries/institutions is inadequate, resulting in the implementation of stock taking and the administration and recording of inventory that is not by the provisions. The purpose of this study is to analyze the Classification, Recognition, Measurement, and Disclosure of Inventory at BPS North Sulawesi Province whether it is in accordance with PSAP 05. This research was conducted using a qualitative approach. The location chosen by the researcher to carry out the research was at the Central Statistics Agency of North Sulawesi Province Jl. August No. 7, Teling Atas, Wanea District, Manado City, North Sulawesi. The recognition of inventory at the Office of the Central Statistics Agency of North Sulawesi has been in accordance with PSAP No. 05 Inventory Measurement carried out by the Central Statistics Agency of North Sulawesi Province, namely procurement carried out by the general section. In recording inventory, the periodic method is used. The treatment of inventory accounting at the Central Statistics Agency of North Sulawesi Province is in accordance with the Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 05.

Keywords: PSAP 05, Inventory, Central Statistics Agency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demi terwujudnya tatanan pemerintah yang baik dan terpercaya sebagai salah satu amanah reformasi, pemerintah terus berupaya dalam melakukan perbaikan atas pengaturan penggunaan keuangan negara dengan cara terbuka tanpa ada yang ditutupi serta akuntabel. Keuangan negara yang dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas merupakan bagian yang diutamakan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang terpercaya dan baik. Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Bachtiar Arif dkk adalah sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut (Amiri dan Thanwain, 2022). Penerapan akuntansi pemerintahan diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang khusus yang nantinya diterapkan secara terus menerus pada saat melakukan kegiatan akuntansi, serta saat melaporkan pertanggungjawaban keuangan agar nantinya dapat disajikan secara tepat waktu, terperinci, dan lengkap.

Penggunaan SAP berdasarkan ketentuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tersebut berisi pedoman akuntansi (sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang penggunaan SAP berdasarkan ketentuan pemerintah daerah, termasuk pedoman prinsip akuntansi untuk pemerintah daerah (Mardiasmo 2021). Karena sifatnya yang strategis, maka perumusan kebijakan akuntansi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Penting untuk menjelaskan dampak dari metode yang dipilih pada proses penganggaran, manajemen dan pelaporan.

Pemerintah daerah dapat mencantumkan kerangka konseptual SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 di awal kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Tujuan dari memasukkan kerangka konseptual SAP yaitu sebagai acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menggunakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Penyusunan kebijakan akuntansi terbagi dua yaitu kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dan kebijakan akuntansi terkait akun-akun yang didalamnya terdapat pernyataan standar akuntansi pemerintahan 05 tentang akuntansi persediaan (Ismail, Karamoy dan Pusung, 2021).

Persediaan barang dagang merupakan aset perusahaan jangka pendek dimana jumlahnya dapat berubah setiap waktu, fenomena inilah yang menimbulkan ketidakakuratan dalam proses pencatatan persediaan. Data yang tidak akurat inilah yang dapat menimbulkan berbagai kesalahan dalam menempatkan jumlah stok barang yang tidak sesuai, dan dampak merugikan lainnya. Beberapa alasan yang sering menyebabkan kesalahan pencatatan persediaan, yaitu: kesalahan perhitungan persediaan fisik, kesalahan dalam alokasi biaya persediaan, jumlah persediaan yang salah dimasukkan pada saat pengiriman, dan posting yang salah dari gudang pengiriman. Kerap kali terjadi selisih persediaan antara pencatatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau pencatatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, rusak, atau habis masa manfaat setelah satu tahun dan di kembalikan ke negara.

Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, terdapat temuan bahwasanya pengendalian atas pengelolaan persediaan pada kementerian/lembaga belum memadai, berdampak adanya pelaksanaan stock opname serta penatausahaan dan pencatatan persediaan yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga, permasalahan tersebut mengakibatkan adanya ketidakakuratan persediaan dalam neraca dan beban persediaan pada LO pemerintah pusat. Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan oleh kelemahan pengendalian pada Kementerian/ Lembaga dalam pengelolaan persediaan

Pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara ini, persediaan atau perlengkapan merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Jenis-jenis persediaan yang ada pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu terdapat Persediaan Barang Habis Pakai dan Barang Tidak Habis Pakai, adapun barang habis pakai yang ada pada Kantor BPS Provinsi Sulawesi Utara yaitu Alat Tulis Kantor, Dokumen/Administrasi, Materai, sedangkan barang tidak habis pakai yaitu Peralatan kebersihan, White board, Marker board, dan Mesin pendikte. Tanpa persediaan, Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara akan mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat. Selain itu, kegiatan di lingkungan instansi pemerintahan juga akan terganggu tanpa adanya persediaan. Seperti yang terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu di kelola secara optimal.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Persediaan pada kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah sesuai dengan PSAP 05.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah bahasa universal bisnis. Seorang ekonom dan politisi terkemuka menyatakan bahwa satu-satunya inovasi terpenting yang membentuk pasar modal adalah pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang baik (*Kieso, Weygandt, and Warfield, 2020*)

Akuntansi Pemerintah

Internasional Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan sektor publik sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai provinsi, negara bagian atau teritori, pemerintah daerah sebagai kota dan entitas pemerintah terkait lainnya seperti lembaga (Akuntansi Pemerintahan : Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah, 2022)

Akuntansi Sektor Publik

Jika organisasi publik adalah pemerintah, maka dalam hal ini penerima dana masyarakat adalah pemerintah, dan dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat umum (masyarakat) dan negara, maka dana yang digunakan pemerintah tersebut harus dilaporkan kepada rakyat dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban melalui sebuah proses akuntansi yaitu Akuntansi Sektor Publik yang dalam hal ini adalah Akuntansi Pemerintahan (*Mardiasmo 2021*).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan mencakup serangkaian langkah terstruktur, termasuk prosedur, penyelenggara, peralatan, dan unsur lainnya, yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi akuntansi dari analisis transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dalam konteks organisasi pemerintah (*Alimus, 2020*).

Akuntansi Persediaan

Persediaan pada umumnya merupakan aktiva terbesar yang ada pada perusahaan maupun sebuah instansi pemerintah. Berdasarkan modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua yang diterbitkan Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (2019). Pencatatan akuntansi pemerintahan menggunakan 2 metode akuntansi berikut diantaranya:

- Metode Perpetual
Sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan yang di catat langsung pada saat transaksi tersebut berlangsung, semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung.
- Metode Periodik
Sistem pencatatan periodik merupakan sistem pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan persediaan dan tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.

Klasifikasi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun karakteristik pokok standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah:

- a) Jumlah pernyataan standar meliputi PSAP 1 tentang penyajian Laporan Keuangan, PSAP 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 6 tentang Akuntansi Investasi, PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan, PSAP 11 tentang Laporan keuangan Konsolidasian, PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
- b) Basis Akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Berdasarkan basis ini, pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dicatat dengan basis akrual. Jika anggaran disusun dengan basis kas, maka digunakan pencatatan basis kas; apabila anggaran disusun dengan basis akrual maka pencatatan juga menggunakan basis akrual.
- c) Laporan Keuangan pokok yang dihasilkan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- d) Informasi Keuangan yang disediakan adalah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas.

Secara aturan, mengklasifikasikan suatu aset pemerintah menjadi persediaan tidak hanya dilihat dari bentuk/wujudnya semata, tetapi juga mempertimbangkan dari maksud atau intensi diadakannya persediaan tersebut. Sebagai contoh, suatu aset berupa peralatan dan mesin, seperti kendaraan bermotor yang diadakan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah akan diklasifikasikan sebagai persediaan, bukan aset tetap meskipun secara fisik wujudnya berupa peralatan dan mesin. Intensi saat dilakukan penganggaran juga akan menentukan barang yang dibeli masuk sebagai persediaan atau tidak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mile, Suwetja (2022) dengan judul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan persediaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 05 mengenai akuntansi persediaan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan penerapannya dan aturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumenta, Morasa, Pinatik (2021) dengan judul Akuntansi Persediaan Barang atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan Tentang Persediaan Barang dan Perlengkapan pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persediaan berdasarkan PSAP 05 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan. Hasil penelitian terhadap penerapan PSAP 05 di Kantor Polres Bolses menunjukan bahwa akuntansi persediaan yang ada pada Polres Bolsel Sebagian besar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05

Penelitian yang dilakukan oleh Umboh, Tinangon (2021) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 05 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan persediaan sudah sesuai dengan PSAP No. 05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kota Manado perlakuan akuntansi persediaannya sudah sesuai dengan PSAP No. 05, yaitu mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal serta saat diterima.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para responden (Ismail et al. 2021). Penelitian deskriptif adalah prosedur statistik untuk menguji generalisasi penelitian yang didasarkan atas satu variabel.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. Agustus No. 7, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara dimulai pada bulan Juni 2024 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber Pengumpulan Data

Jenis data penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kata bukan angka dan mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian (Sujarweni, 2023:89). Data yang akan diperoleh dari peneliti yaitu bentuk informasi secara langsung melalui proses wawancara dan dokumen-dokumen pendukung dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah dalam bentuk wawancara dengan narasumber dan pengumpulan dokumen mengenai bukti transaksi eksternal, laporan keuangan BPS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Barang Milik Negara. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang telah diolah dengan baik oleh Instansi maupun Perusahaan, seperti profil Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan proses wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang ingin diteliti Andra (2018:117).

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara:

- 1) Observasi pada BPS Prov Sulut (dokumentasi berupa arsip-arsip, data keuangan, serta data-data lainnya yang berkenaan dengan penelitian)
- 2) Menganalisis laporan realisasi anggaran dari BPS tahun 2023
- 3) Menganalisis laporan keuangan BPS Prov Sulut berupa, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta laporan operasional.
- 4) Mengklasifikasikan laporan atau prosedur pencatatan persediaan dengan mencari proses pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas dua yaitu :

- 1) Barang Habis Pakai yang terdiri dari :
 - Peralatan Tulis-Menulis seperti; pulpen, pensil, stabilo, kertas hvs, kertas memo, buku catatan, dan lain-lain
 - Bahan Cetak seperti: tinta printer dan toner
 - Peralatan Kebersihan seperti: tisu, sabun cuci tangan, dan kain lap
- 2) Barang Tidak Habis Pakai yang terdiri dari :
 - Alat Tulis Menulis yang digunakan untuk kegiatan survey
 - Kuisioner Survey
 - Rompi Survey

Pengakuan Persediaan

Pengakuan Persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dapat diakui karena memiliki nilai yang dapat diukur dan diakui pada saat persediaan yang dibelanjakan sudah tiba atau diterima di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengadaan persediaan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dilakukan fleksibel mengikuti sehabisnya stok, dalam kurun waktu satu tahun untuk pengadaan barang keperluan kantor diadakan setiap dua bulan sekali, dan untuk ATK diadakan per triwulan. Untuk cek fisik (*stock opname*) dilakukan setiap satu semester atau enam bulan di tiap akhir periode. Pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan *approval* atau otorisasi pada pelaporan persediaan adalah Kepala Kantor

BPS. Keputusan ini mencakup verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan data persediaan sebelum laporan resmi disampaikan.

Pengukuran Persediaan

Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dengan penentuan nilai atau harga dari persediaan menggunakan pembelian terakhir (HTP). Penilaian Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan metode FIFO yaitu dengan mencatat sebuah barang masuk pada urutan pertama harus keluar pada urutan pertama juga. Dalam pengadaan persediaan dalam bentuk barang di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, jika ada barang expired atau sudah tidak layak dipakai, maka akan dihapus atau diusangkan dengan cara dibakar atau dibuang isinya, tetapi harus berdasarkan persetujuan Badan Pusat Statistik pusat. Jika ada persediaan yang tidak sesuai dengan permintaan, maka dari pihak PPK akan berkoordinasi dengan bagian penyedia (*buyer*) untuk dilakukan pengembalian barang

Beban Persediaan

Beban persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dicatat sebesar pemakaian persediaan, dan dari perhitungan beban persediaan tersebut akan disajikan ke dalam laporan operasional. Dalam setiap akhir tahun, laporan tersebut kemudian akan diserahkan kepada bendahara penerimaan terhadap permintaan persediaan dengan jumlah yang dibutuhkan dan jumlah yang akan diterima serta berapa banyak pemakaian persediaan dalam kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan melalui laporan tersebut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara akan melihat persediaan apa saja yang paling sering dibutuhkan, maka untuk permintaan persediaan pada tahun berikutnya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara akan memperbanyak persediaan tersebut. Kemudian untuk pemakaian atau beban persediaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat banyak sesuai besarnya persediaan yang digunakan (*Use Of Goods*). Pencatatan persediaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara periodik, dimana akan dilakukan pencatatan pada saat terjadi penambahan persediaan terhadap persediaan yang habis stok.

Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara diungkapkan dalam Laporan Keuangan kemudian dicatat pada kartu stok, dan buku pengeluaran barang yang nantinya dibuat surat bukti barang keluar dan surat bukti barang masuk. Dokumen kelengkapan yang menunjang pencatatan persediaan yaitu kartu stok dan buku penerimaan barang. Pelaporan persediaan ke aplikasi SAKTI dilakukan Cek fisik (*stock opname*) dilakukan setiap semester atau enam bulan sekali untuk menyamakan catatan pembukuan yang ada di aplikasi SAKTI dengan stok persediaan di gudang, Pencatatan persediaan keluar dicatat setiap adanya transaksi atau perlakuan secara manual di kartu stok.

Pembahasan

Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan pada kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat persediaan diterima dan ada di dalam kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara beserta beberapa dokumen, seperti dokumen lainnya yang terdapat nilai atau harga, agar bisa di verifikasi dan dapat diukur. Selama persediaan belum ada pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, maka persediaan belum bisa diakui sebagai persediaan milik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Pencatatan persediaan yang keluar dan masuk langsung dicatat saat itu juga dan untuk pengecekan fisik (*Stock Opname*) di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dilakukan setiap enam bulan sekali atau di akhir tanggal 30 Juni dan 31 Desember untuk menyesuaikan pencatatan yang masuk dan keluar di aplikasi SAKTI dengan sisa stok persediaan di gudang.

Proses pengakuan dan pengelolaan persediaan dimulai dari pengadaan barang hingga pencatatan dan verifikasi yang sistematis. Pengadaan persediaan dilakukan oleh bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang bertanggung jawab untuk menghitung kebutuhan dan melakukan belanja sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam proses ini mencerminkan adanya mekanisme pembayaran yang efisien dan terencana. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan operasional BPS. Setelah barang diterima, bendahara kantor akan melakukan pelunasan dan mengakui persediaan sebagai milik BPS. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan persediaan tidak hanya bergantung pada penerimaan fisik, tetapi juga pada nilai yang dapat diukur.

Proses ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Stock opname dilakukan setiap semester, yaitu pada 30 Juni dan 31 Desember, untuk memastikan kesesuaian antara

pencatatan dalam sistem dan kondisi fisik persediaan. Proses ini vital untuk menjaga akurasi data dan mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian, yang dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau kehilangan barang. Ketidakcocokan ini ditangani dengan penyesuaian data di aplikasi SAKTI, menunjukkan adanya sistem kontrol yang ketat dalam pengelolaan persediaan. Kepala Kantor BPS memiliki peran penting dalam memberikan otorisasi terhadap pelaporan persediaan. Langkah ini memastikan bahwa semua data yang dilaporkan adalah akurat dan lengkap.

Dengan adanya otorisasi, laporan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi risiko kesalahan yang dapat berdampak pada efisiensi operasional BPS. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pengelolaan persediaan di BPS Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sistematis. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar BPS melakukan pelatihan berkala kepada staf mengenai penggunaan aplikasi SAKTI dan prosedur pengelolaan persediaan. Selain itu, evaluasi rutin terhadap proses pengadaan dan stock opname dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga pengelolaan persediaan semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.

Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 dalam hal pengakuan persediaan yaitu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau pengusaannya berpindah, serta pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan bahwa pengakuan persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 05 dalam hal pengakuan persediaan.

Pengukuran Persediaan

Pengukuran Persediaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu diperoleh pengadaan yang dilakukan oleh bagian umum disesuaikan dengan kebutuhan bidang dan terlebih khususnya untuk keperluan pendataan dalam bentuk survei. Penilaian persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan cara tiap persediaan yang masuk pertama akan dikeluarkan juga yang pertama. Dari cara penilaian tersebut sama halnya dengan metode *FIFO (First In First Out)* di mana metode unit persediaan ini menghitung yang pertama kali masuk ke gudang akan dikeluarkan pertama juga.

Terdapat berbagai aspek penting dalam pengukuran pengelolaan persediaan, mulai dari proses pembelian hingga pengukuran dan penilaian persediaan. Pada proses pembelian dan pencatatan persediaan, setiap persediaan yang ada di BPS diperoleh melalui pembelian, dan kwitansi dari pembelian tersebut dicatat oleh tim keuangan. Peran operator komitmen di sistem aplikasi SAKTI sangat penting, karena mereka bertanggung jawab untuk mencatat barang, harga, dan kode barang dengan tepat. Kesalahan dalam pencatatan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian yang serius, seperti tidak dapat menutup buku bulanan atau kesulitan dalam proses rekonsiliasi.

Pengukuran persediaan dilakukan dengan mengacu pada rincian kebutuhan dari setiap bidang internal, yang diproses secara sistematis. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap bidang mendapatkan persediaan sesuai dengan kebutuhannya, terutama saat melaksanakan kegiatan seperti sensus. Proses pencatatan yang rutin dan sistematis setiap kali ada persediaan masuk dan keluar membantu menjaga akurasi data dan meminimalkan kemungkinan kesalahan. BPS menggunakan metode penilaian FIFO (First In, First Out) untuk pengelolaan persediaan. Metode ini mengharuskan barang yang pertama kali masuk untuk menjadi yang pertama kali keluar, sehingga membantu dalam mengurangi risiko kadaluarsa barang. Penggunaan harga terakhir pembelian (HTP) sebagai acuan nilai persediaan juga menunjukkan praktik yang efisien dalam penilaian aset.

Dalam hal pengelolaan barang yang sudah expired atau tidak layak pakai, BPS memiliki prosedur yang jelas untuk menghapusnya. Proses pengusangan yang melibatkan persetujuan dari BPS pusat menunjukkan bahwa ada kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa semua tindakan pengelolaan barang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Jika terdapat persediaan yang tidak sesuai permintaan, koordinasi antara PPK dan bagian penyedia menjadi kunci dalam penyelesaian masalah. Proses pengembalian barang yang tidak sesuai mencerminkan komitmen BPS untuk menjaga kualitas dan relevansi persediaan yang dimiliki.

Secara keseluruhan, pengelolaan persediaan di BPS Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan sistem yang terstruktur dan baik. Namun, untuk lebih meningkatkan efisiensi, disarankan agar dilakukan pelatihan rutin untuk operator komitmen mengenai penggunaan sistem SAKTI dan pemahaman tentang pentingnya akurasi dalam pencatatan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses pengadaan dan pencatatan dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Beban Persediaan

Pencatatan beban persediaan di BPS dilakukan berdasarkan pemakaian persediaan yang tercatat secara berkala, yaitu setiap akhir minggu. Dengan menggunakan kartu bon permintaan barang, proses ini memastikan

bahwa setiap penggunaan persediaan terdokumentasi dengan baik. Ini penting untuk menjaga akurasi dalam laporan keuangan, karena beban persediaan yang dicatat mencerminkan penggunaan aktual. Pencatatan beban persediaan yang dilakukan pada hari Jumat atau Senin pagi menunjukkan adanya rutinitas yang teratur, yang dapat meminimalkan kesalahan pencatatan. Penggunaan sistem otomatis untuk mencatat setiap transaksi persediaan juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manual. Hanya koreksi beban yang dicatat secara manual, yang menunjukkan bahwa sistem sudah terintegrasi dengan baik.

Laporan operasional yang mencerminkan semua beban persediaan yang digunakan sangat penting bagi pengambilan keputusan di BPS. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar untuk analisis kebutuhan persediaan di masa mendatang. Dengan mengevaluasi penggunaan persediaan, BPS dapat mengidentifikasi barang-barang yang paling sering dibutuhkan dan memperkirakan jumlah yang diperlukan untuk tahun berikutnya. Pencatatan yang baik memungkinkan BPS untuk memahami pola pemakaian persediaan, sehingga dapat melakukan permintaan yang lebih tepat di masa mendatang. Proses ini mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, dengan mengurangi kemungkinan kelebihan atau kekurangan persediaan. Hal ini juga penting dalam menjaga kelancaran operasional, terutama selama kegiatan besar seperti sensus. Pencatatan secara periodik, terutama saat terjadi penambahan persediaan, menunjukkan praktik yang baik dalam manajemen persediaan. Ini memastikan bahwa setiap perubahan dalam jumlah persediaan tercatat dengan akurat, sehingga membantu dalam pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Beban Persediaan dihitung berdasarkan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit. Metode yang digunakan adalah harga perolehan terakhir sesuai dengan hasil penelitian.

Pengungkapan Persediaan

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dalam pengungkapan yaitu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan yaitu metode yang digunakan dalam pengukuran dan penilaian persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu menggunakan metode *FIFO (First In First Out)*, dimana persediaan yang masuk pertama akan di keluarkan pertama juga. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara juga mengungkapkan penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan yang ada pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, yaitu barang yang disimpan untuk dipakai dalam kegiatan operasional kantor, atau untuk diserahkan kepada satuan kerja kabupaten/kota Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Pengungkapan persediaan dilakukan melalui kartu stok, buku pengeluaran barang, serta dokumen bukti barang masuk dan keluar. Proses ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Dengan pencatatan yang rapi, BPS dapat menyajikan persediaan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan neraca, yang memberikan gambaran akurat mengenai posisi keuangan institusi. Pentingnya keamanan barang persediaan di gudang diakui melalui penyimpanan kunci yang aman dan tidak dipegang oleh satu orang saja. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kehilangan atau pencurian, tetapi juga memastikan bahwa barang dapat diakses dengan cepat jika diperlukan secara mendadak. Prosedur keamanan ini mencerminkan keseriusan BPS dalam menjaga integritas aset yang dimilikinya.

Cek fisik (stock opname) yang dilakukan setiap semester merupakan praktik yang baik untuk memastikan kesesuaian antara catatan pembukuan di aplikasi SAKTI dan stok fisik di gudang. Proses ini memungkinkan identifikasi dan koreksi atas ketidaksesuaian yang mungkin terjadi, serta menjaga akurasi dalam laporan keuangan. Stock opname yang rutin juga meningkatkan kontrol internal dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. BPS menggunakan metode *FIFO (First In, First Out)* untuk penilaian persediaan, yang berarti barang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Metode ini sangat efektif dalam mengelola persediaan, terutama untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa. Selain itu, penentuan nilai atau harga persediaan yang mengikuti harga pembelian terakhir memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai yang realistis dan terkini.

Dokumentasi yang lengkap, termasuk kartu stok dan buku penerimaan barang, sangat penting dalam mendukung pencatatan persediaan. Kebijakan akuntansi yang jelas dan terstruktur membantu memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan baik, yang pada gilirannya mendukung integritas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan juga pembahasan yang dilakukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP No. 05 pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian ini yaitu

perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05. Dapat dilihat dari 5 poin dibawah:

1. Klasifikasi Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05 di mana Klasifikasi Persediaan yang ada pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara berupa Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Alat kebersihan, dan Computer Supplies, serta Barang Tak Habis Pakai seperti komputer, print dan lain-lain.
2. Pengakuan persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05 di mana persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.
3. Pengukuran persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05, di mana pengukuran dan penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO (First In First Out)* untuk dapat mengurangi risiko kerusakan atau keusangan pada persediaan dan juga Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dengan harga perolehan di mana untuk penentuan nilai atau harga dari persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.
4. Beban Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05 di mana Beban Persediaannya dicatat sesuai besarnya persediaan yang digunakan dan setiap tahunnya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara membuat laporan operasional serta persediaan dicatat secara periodic pada saat terjadi penambahan terhadap persediaan.
5. Pengungkapan Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Persediaan (PSAP) No. 05 di mana persediaan yang ada pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara diungkapkan dalam kartu stok, dan buku pengeluaran barang.

Saran

Saran dari penelitian ini, mengenai analisis penerapan PSAP 05 atas penyajian persediaan dalam laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi utara yaitu saran untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara agar tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku, melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya, serta lebih memperhatikan pengelolaan persediaan dalam hal pengakuan, pengukuran, beban dan pengungkapan persediaan, terlebih khusus untuk pencatatan persediaan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau keterlambatan pencatatan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan lebih akurat dan transparan khususnya menyangkut laporan persediaan pada Badan Pusat Statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimus, Emi. 2020. 'Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi'. *Jurnal Akuntansi Stie Muhamadiyah Palopo* 06:52–63. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/543>
- Amiri, And Thanwain. 2022. 'Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta'. *Doctoral Dissertation, Stie Widya Wiwaha*. <http://eprint.stieww.ac.id/227/>
- Ismail, Karamoy, Pusung. 2021. 'Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (Psap) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara'. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 248–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/36374>
- Karunia, R., And Azas Mabrur. 2022. *Akuntansi Pemerintahan : Konsep Dan Praktik Di Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Edited By A. Susila. Salemba Empat.
- Kieso, Donald, Jerry Weygandt, And Terry Warfield. 2020. *Intermediate Accounting Ifrs Edition 4th Ed*. 4th Ed. Wiley.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019). *Intermediate Accounting*. Wiley. United States of America.
- Lumenta, Morasa, And Pinatik. 2021. 'Akuntansi Persediaan Barang Atau Perlengkapan Berdasarkan Psap Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan'. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5:146–54.

Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Edited By Mardiasmo. Andi.

Nurfitriani, Elfreda Lau, And Annisa. 2021. *Analisis Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan Psak No 14 Pada Pt United Dico Citas Samarinda*. <https://www.neliti.com/publications/398768/analisis-pencatatan-dan-penilaian-persediaan-barang-dagang-berdasarkan-psak-no-1>

Republik Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung:Fokusindo Mandiri

Rifai, R. P., And J. J. Tinangon. 2016. 'Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara'. *11 Jurnal Emba* 5(1):11–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15418>

Sujarweni V, Wiratna.(2023). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Tuar, Samuel, Walenhein, And Heince Wokas. 2023. 'Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Psap Nomor 05 Pada Klinik Pratama Kantor Gubernur Sulawesi Utara'. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 202–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/51289>

Umboh, Tinangon, 2021. 'Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado' *Jurnal Emba* 9(2):967–74. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33920>

Waworega, Manossoh, Tangkuman. 2018. 'Analisis Penerpan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa'. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 214–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20991/0>